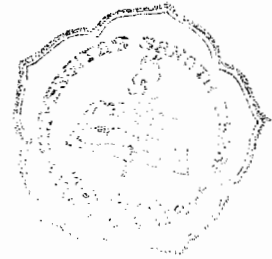


**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH  
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :  
**Ch. Erlita Retnowati**  
NIM : 012114109

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA

2005

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH  
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :  
**Ch. Erlita Retnowati**  
NIM : 012114109

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA

2005

**Skripsi**  
**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN**  
**OTONOMI DAERAH**  
**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Oleh :  
*Ch. Erlita Retnowati*  
NIM : 012114109

Telah disetujui oleh :

**Pembimbing I**

**Tanggal : 30 Juni 2005**



**Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt.**

**Pembimbing II**

**Tanggal : 4 Agustus 2005**



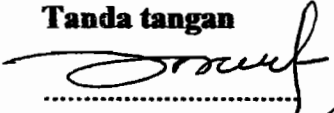

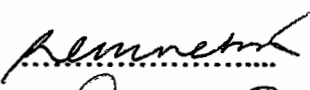
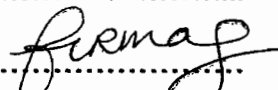
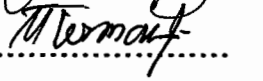
**Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.**

**Skripsi**  
**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN**  
**OTONOMI DAERAH**  
**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :  
**Ch. Erlita Retnowati**  
NIM : 012114109

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 31 Agustus 2005  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Panitia Penguji**


	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda tangan</b>
<b>Ketua</b>	Drs. Yusef Widya K., M.Si., Akt	
<b>Sekretaris</b>	Fr. Reni Retno A, S.E., M.Si., Akt	
<b>Anggota</b>	Fr. Reni Retno A, S.E., M.Si., Akt	
<b>Anggota</b>	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
<b>Anggota</b>	Maria Theresia Ernawati, S.E., M.A.	

Yogyakarta, 31 Agustus 2005

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



  
Alex Kahu Lantum, M.S.

*Whatever you do,  
do it all for God's glory.*

**When Jesus answered your prayer, He is  
increasing your faith.  
When Jesus postponed your prayer, He  
is increasing your patient.  
When Jesus answered NO for your  
prayer, it means He has a  
BETTER plan for you.**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus Juruslamatku, Bapa dan Sahabatku*
- ❖ *Yang Tercinta Bapak dan Mama*
- ❖ *Br. Cajetanus FIC terkasih*
- ❖ *Dd-ku Ari yang imut*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 4 Agustus 2005

Penulis,



Ch. Erlita Retnowati

**ABSTRAK**

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN**  
**OTONOMI DAERAH**  
**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**Ch. Erlita Retnowati**  
**Universitas Sanata Dharma**  
**Yogyakarta 2005**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah; dan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara PAD dengan TPD dan perbandingan PAD dengan Transfer Pemerintah, perbandingan PAD terhadap TPD, perbandingan BHP terhadap TPD, perbandingan SB terhadap TPD, perbandingan TPAD terhadap TPRD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 – 2003 meningkat; rata-rata pertumbuhan Transfer Pemerintah meningkat; DOFD dari rasio antara PAD terhadap TPD cenderung meningkat, dan dari rasio PAD terhadap Transfer Pemerintah cenderung meningkat; PPAD cenderung meningkat; PBHP cenderung berfluktuasi; PSB cenderung meningkat; IKRD cenderung berfluktuasi.

**ABSTRACT**

**THE ANALYSIS OF LOCAL FINANCIAL POTENTIAL**

**BEFORE AND DURING THE REALIZATION OF**

**LOCAL AUTONOMY**

A CASE STUDY AT THE GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY

**Ch. Erlita Retnowati**  
**Sanata Dharma University**  
**Yogyakarta 2005**

The research aimed to know the growth level of Pendapatan Asli Daerah (PAD) and government transfer; and to know the level of financial regional capability before and during the realization of local autonomy.

This research was a case study at the government of Yogyakarta City. In order to collect the data, the researcher used library survey, interview, and the documentation. In the analysis the researcher used the comparison the PAD realization of certain times, the comparison between PAD and TPD (Total Penerimaan Daerah), the comparison between PAD and government transfer, the comparison between PAD and TPD, the comparison between BHP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) and TPD, the comparison between SB (Sumbangan dan Bantuan) and TPD, the comparison between TPAD (Total Pendapatan Asli Daerah) and TPRD (Total Pengeluaran Rutin Daerah) to analyze the data.

The result of this research showed that the average of PAD growth was increasing, the average of government transfer are increasing; DOFD (Derajat Otonomi Fiskal Daerah) from ratio between PAD and TPD was increasing, and from the ratio of PAD and government transfer was increasing; PPAD (Peranan Pendapatan Asli Daerah) was increasing; PBHP (Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) was fluctuating; PSB (Peranan Sumbangan dan Bantuan) was increasing; IKRD (Indeks Kemampuan Rutin Daerah) was fluctuating.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, berkat, rahmat, karunia, bimbingan dan kasih-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

Tugas akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Sanata Dharma Yogyakarta berupa penelitian mengenai “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah”

Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt., sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga penulisan tugas akhir ini.
2. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., sebagai Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga penulisan tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf BPKD Kota Yogyakarta atas semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis dalam mencari data sampai selesainya penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang turut membantu proses belajar penulis selama kuliah.
7. Bapak, Mama tercinta dan Br. Cajetanus serta dd-ku yang tersayang yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi serta setia mendengarkan keluhanku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Buat Kakak Wanti yang selalu ada di sampingku selama studi di Yogya dan memberi banyak masukan tentang banyak hal, Om dan Tante Batara Randa yang selalu setia menguatkanmu dalam doa.
9. Teman-teman: Tommy, Christian, Rubi, Toinks, Ruri, Dia, Sony, Linda, Adit Saphat, Qwot, Iron, Jonathan, Charles, Joshua, Ronald, Shinta, Adis, Neria, Ulis, Ani, Bayu, Ied, Vitra, Pepenk, Ade Ncis terima kasih buat kebersamaan yang masih dirasakan sampai sekarang.
10. Sr. Benedicte, C.B., selaku pimpinan Asrama Syantikara, Sr. Laurent dan Sr. Elia terima kasih sudah menerima saya menjadi keluarga besar Syantikara. Juga teman-teman Syantikara, khususnya anak-anak Kopel 12 (K'Wanti, Yuli, Brenda, Aline, Tina, Ari), Diah, K' Ella, Mba Dwi, Finda, Hayu, Indah, Fani,

Meniq, Anyesh, Christine, Viani, Adek2 lucu Unit 3 terima kasih sudah menerimaku menjadi bagian dalam kehidupan kalian sehari-hari.

11. Seseorang yang sudah membuat aku belajar untuk memahami dan mengerti serta memberikan kenangan tersendiri di hati.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu di sini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 4 Agustus 2005

Penulis

## DAFTAR ISI



<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> ....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Otonomi Daerah .....	7
B. Perkembangan Pemikiran Otonomi Daerah .....	10
C. Kemampuan Keuangan Daerah .....	11

D. Pendapatan Asli Daerah .....	13
E. Transfer Pemerintah.....	13
F. Derajat Otonomi Fiskal .....	15
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	18
D. Data yang Diperlukan.....	18
E. Teknik Pengumpulan Data.....	19
F. Teknik Analisis Data.....	20
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta .....	26
B. Kondisi Geografis.....	27
C. Iklim .....	29
D. Pemerintahan Daerah .....	29
E. Pembagian Wilayah .....	30
F. Kependudukan .....	30
G. Tenaga Kerja .....	32
H. Transmigrasi.....	33
I. Transportasi .....	33
J. Pos dan Komunikasi .....	34
K. Kekayaan Alam .....	35
L. Nilai-nilai Budaya.....	36

M. Ekonomi.....	38
<b>BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Diskripsi Data.....	40
B. Analisis Data.....	45
C. Pembahasan .....	57
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	12
Tabel III.1	Kategori Kemampuan Rutin Daerah .....	23
Tabel III.2	Kategori Kemampuan Keuangan Daerah.....	24
Tabel IV.1	Jarak antara Balaikota Yogyakarta dengan Kantor Kecamatan .....	30
Tabel IV.2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta.....	31
Tabel IV.3	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	32
Tabel V.1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.....	40
Tabel V.2	Realisasi Transfer Pemerintah Kota Yogyakarta.....	40
Tabel V.3	Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta .....	41
Tabel V.4	Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta.....	42
Tabel V.5	Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Yogyakarta.....	43
Tabel V.6	Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kota Yogyakarta .....	43
Tabel V.7	Total Pengeluaran Rutin Daerah Kota Yogyakarta.....	44
Tabel V.8	Perkembangan dan Pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta...	46
Tabel V.9	Perkembangan dan Pertumbuhan TP Kota Yogyakarta.....	49
Tabel V.10	Rasio PAD terhadap TPD Kota Yogyakarta.....	50
Tabel V.11	Rasio PAD terhadap TP Kota Yogyakarta.....	51

Tabel V.12 Rasio PAD terhadap TPD Kota Yogyakarta.....	52
Tabel V.13 Perkembangan dan Pertumbuhan BHP Kota Yogyakarta....	54
Tabel V.14 Peranan BHP terhadap TPD Kota Yogyakarta.....	54
Tabel V.15 Peranan SB terhadap TPD Kota Yogyakarta.....	55
Tabel V.16 Peranan PAD terhadap PRD Kota Yogyakarta.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah, sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakikatnya adalah merupakan pemberian wewenang kepada daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan asas desentralisasi dengan pembentukan otonomi daerah tersebut maka kepada daerah diberikan kekuasaan bertindak dan berprakarsa sepenuhnya yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan berbagai faktor yang mempunyai pengaruh bagi perwujudan otonomi daerah. Pada dasarnya otonomi atau desentralisasi merupakan upaya mencari titik optimal dalam penyerahan urusan dan tanggungjawab antar berbagai tingkat pemerintahan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan), dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat (Indra Bastian, 2001:229).

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pusat dan Propinsi. Dengan diberlakukannya

otonomi daerah sejak bulan Januari 2001 maka setiap daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Otonomi berkaitan erat dengan kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi itu sendiri, agar titik optimal dalam penyerahan tanggungjawab dalam mendukung terciptanya *good governance* dapat dicapai. Untuk itu diperlukan suatu studi guna menganalisis kemampuan keuangan dalam rangka pelaksanaan otonomi.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah merupakan bentuk dari sistem desentralisasi dengan menitikberatkan pada demokratisasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat banyak alasan dan tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah, yang pada prinsipnya adalah bahwa otonomi daerah mutlak diperlukan pemerintah daerah. Namun masalahnya, dengan kewenangan yang sangat luas diberikan kepada daerah seyogyanya didukung oleh kesiapan daerah dalam menjalankan otonomi daerah itu sendiri, terutama kemampuan keuangan daerah.

Yogyakarta memiliki potensi perekonomian lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari sektor pertanian yang hanya memiliki lahan pertanian yang terbatas, dan sumber daya alam yang dimiliki Kota Yogyakarta juga terbatas. Penulis tertarik untuk meneliti Kota Yogyakarta dengan keterbatasan potensi daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah?

## **C. Batasan Masalah**

Secara umum, suatu daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari tiga aspek (Hendrik, 2000:14-16) yakni aspek prasarana dan sarana, pembiayaan dan personalia. Dalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi, hanya melihat aspek pembiayaan yaitu dengan melihat struktur penerimaan daerah terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah pusat, khususnya pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 1997/1998 - 1999/2000 dan tahun 2001 - 2003.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah; dan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari aspek keuangan. Analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sejak tahun anggaran 1997/1998 – 1999/2000 dengan melihat peranan

Pendapatan Asli Daerah, kemampuan rutin daerah, dan Derajat Otonomi Fiskal Daerah; dan setelah diberlakukannya otonomi daerah, tahun 2001 - 2003 dengan melihat proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahun 2001 sesuai dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan kebijakan di bidang fiskal daerah, terutama untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

##### 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi kepustakaan.

##### 3. Bagi Penulis

Mendapatkan tambahan pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta dan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian akan dibahas pula tentang perkembangan pemikiran otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, pendapatan asli daerah, transfer pemerintah, dan derajat otonomi fiskal.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Kota Yogyakarta secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya Kota Yogyakarta, kondisi geografis, iklim, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, transportasi, pos dan komunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, dan ekonomi.

**BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang diskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, serta saran-saran yang diperlukan yang berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Otonomi Daerah**

Istilah otonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang (Tumilar,1997:10). Pada perkembangan selanjutnya istilah otonomi memberikan makna yang semakin luas dan penggunaannya selalu disandingkan dengan istilah daerah. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ada beberapa pedoman pemberian otonomi kepada daerah. (Citra Umbara, 2004)

1. penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
2. pelaksanaannya berdasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
3. otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada propinsi (propinsi bukan atasan kabupaten dan kota);
4. sesuai dengan konstitusi dan keserasian pusat, daerah, dan antar daerah;

5. wilayah administratif dan kawasan pembinaan khusus dihapus;
6. meningkatkan peran legislatif sebagai pengawas maupun fungsi anggaran;
7. asas dekonsentrasi dilaksanakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administratif;
8. asas perbantuan dimungkinkan.

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah antara lain pelaksanaan otonomi harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, yaitu: (Citra Umbara, 2004)

1. otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang



harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Bab I Pasal 2 butir b menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Daerah Otonom seperti dijelaskan dalam pasal 1 butir h adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintahan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pengertian otonomi menurut Ginandjar Kartasasmita (1996:346) adalah “pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Substansi apa yang

dikelola dalam suatu daerah otonom dan bagaimana mengelolanya akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, kemampuan teknis dan manajerial, tata nilai dan tradisi serta kelembagaan yang mengakar dan berkembang dalam suatu daerah yang kondisinya tidak selalu seragam dibandingkan dengan daerah lain.

### **B. Perkembangan Pemikiran Otonomi Daerah**

Dalam perkembangannya otonomi daerah di Indonesia dalam kurun waktu 1980-2000 dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mana mempunyai karakteristik sendiri. Periodisasi tersebut adalah (Indra Bastian, 2001:228) :

#### 1. Periode 1980-1985

Walaupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 telah mengisyaratkan tetapi realisasinya dimulai pada awal tahun 1980, yaitu dengan ditandai terbentuknya kotamadya yang hanya bersifat administratif saja.

#### 2. Periode 1986-1990

Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya PP RI tentang titik berat penyelenggaraan otonomi daerah Dati II yang sebelumnya didahului dengan perumusan mengenai persiapan otonomi daerah pada Dati I dan Dati II. Selain itu juga muncul usulan-usulan tentang perkembangan keuangan.

### 3. Periode 1991-1997

Periode ini mulai lebih ditegaskan realisasi pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tingkat II yaitu dengan dilaksanakannya proyek percontohan otonomi daerah Dati II.

### 4. Periode 1998-.....

Bergulirnya reformasi ternyata membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah yang seutuhnya.

## **C. Kemampuan Keuangan Daerah**

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2004: 188-189) yaitu :

#### 1. pola hubungan instruktif

Dalam pola hubungan ini, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. pola hubungan konsultatif

Dalam pola hubungan ini, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. pola hubungan partisipatif

Dalam pola hubungan ini, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. pola hubungan delegatif

Dalam pola hubungan ini, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, untuk melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan daerah dilihat dari sisi keuangan dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Pola Hubungan dan**  
**Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

*Sumber : Halim, 2004 : 189*

#### **D. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Henricus W. Ismanthono (2003:124), Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi komponen hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sangat berperan dan menjadi salah satu sumber yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal merupakan tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah, di mana semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi suatu daerah dan semakin tinggi Derajat Otonomi Fiskal memperlihatkan kesiapan suatu daerah dalam berotonomi. (Tumilar, 1997:31)

#### **E. Transfer Pemerintah**

Transfer pemerintah dalam istilah lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan dan bantuan. Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta sumbangan lain yang diatur dengan

perundang-undangan. Jenis sumbangan ini antara lain : ganjaran, subsidi/perimbangan keuangan, subsidi bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri, subsidi bantuan biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, subsidi pengembangan objek wisata, tunjangan penghasilan kepala desa dan lain-lain. Bantuan adalah sejenis bantuan atas instruksi presiden (inpres) yang digunakan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Secara umum, bantuan (*grant*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibedakan dalam dua macam (Halim, 2004:52-54) :

- a. bantuan umum (*general grant/unconditional grant*)
- b. bantuan khusus (*specific grant/conditional grant*)

Di Indonesia, bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua kategori, yaitu : (Hendrik, 2000:27)

- a. Subsidi Daerah Otonom (SDO), terdiri dari belanja pegawai, belanja nonpegawai yang diarahkan dan belanja pegawai yang ditetapkan, yakni subsidi/bantuan daerah dan ganjaran.
- b. Bantuan Pembangunan Daerah (Bantuan Inpres), terdiri dari bantuan umum berupa bantuan pembangunan propinsi, kabupaten, dan desa; bantuan khusus berupa bantuan penunjang jalan dan jembatan kabupaten, bantuan pembangunan sarana kesehatan dan bantuan penghijauan/reboisasi.

Bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan umum, pemerintah daerah berwenang menentukan untuk apa bantuan tersebut digunakan, asal dipergunakan untuk sektor-sektor yang tepat sesuai dengan program yang telah disetujui

sebelumnya. Bantuan yang bersifat khusus, pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara pelaksanaannya (Devas, 1989:179-191).

Bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak pada semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan bukan sebaliknya. Hakekat bantuan adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah, oleh karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana bantuan (transfer) sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

#### **F. Derajat Otonomi Fiskal**

Otonomi fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan menurut. Hal ini disebabkan karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Tumilar, 1997:12). Namun demikian harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah. Rendahnya Derajat Otonomi Fiskal di Indonesia juga tercermin dari indeks kemampuan rutin dari masing-masing daerah baik kabupaten maupun propinsi seluruh Indonesia. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia belum mampu membiayai pengeluaran rutin.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 sumber-sumber pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, yakni terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah mencakup
  - i. Hasil Pajak Daerah
  - ii. Hasil Retribusi Daerah
  - iii. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
  - i. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan serta penerimaan dari sumber daya alam.
  - ii. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - iii. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Pinjaman daerah.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pengukuran derajat otonomi keuangan daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangga dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah tanpa transfer (Radianto, 1997:47). Melalui struktur pengeluaran daerah, derajat otonomi keuangan tercermin dalam angka indeks kemampuan rutin, yaitu proporsi



antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran rutin tanpa transfer pemerintah pusat (Kuncoro, 1995:9 dan Radianto 1997:42).

Derajat Otonomi Fiskal menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Ukuran yang digunakan untuk mengukur Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat dilihat dari struktur penerimaan daerah, dengan menggunakan *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio yang dimaksud berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 Derajat Otonomi Fiskal suatu daerah semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah bila rasio mendekati 0. Melalui struktur pengeluaran daerah, derajat otonomi keuangan tercermin melalui angka indeks kemampuan rutin, yaitu proporsi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran rutin (Kuncoro,1995:9).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Pusat Statistik, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
2. Waktu Penelitian : April – Juli 2005

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

1. Subyek Penelitian : Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Obyek Penelitian : PAD, APBD, dan pengeluaran rutin daerah

#### **D. Data yang Diperlukan**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode pengamatan sejak tahun anggaran 1997/1998 – 1999/2000 sebelum diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah yakni realisasi penerimaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan subsidi serta penerimaan pembangunan; Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengeluaran rutin daerah yang dipergunakan untuk mencari Indeks Kemampuan Rutin daerah selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 - 2003 dengan melihat proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahun 2001 sesuai dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 di Kota Yogyakarta.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penulisan dan disarikan dalam bentuk literatur atau buku-buku karangan ilmiah maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara:
  - a. Wawancara, yaitu dengan cara berdialog langsung dengan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Pusat Statistik, dan Bappeda.
  - b. Dokumentasi, yaitu dengan melihat langsung dan menganalisa catatan-catatan dan laporan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Pusat Statistik, dan Bappeda.

## F. Teknik Analisis Data

1. Alat analisis untuk menghitung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah menggunakan rumus (Thamrin Simanjuntak, 2003:8)

$$g = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \times 100\%$$

$g$  = rata-rata pertumbuhan masing-masing variabel per tahun

$x_t$  = nilai masing-masing variabel per tahun

$x_{t-1}$  = nilai masing-masing variabel pada tahun sebelumnya

2. Alat analisis untuk menentukan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

Alat analisis yang digunakan untuk menentukan hubungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal yang kuat antara daerah dengan pemerintah pusat adalah dengan:

- a. membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah, menggunakan rumus (Depdagri, RI, 1991)

$$DOFD_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

- b. membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan transfer pemerintah menggunakan rumus (Depdagri, RI, 1991)

$$DOFD_t = \frac{PAD_t}{TP_t} \times 100\%$$

DOFD<sub>t</sub> = Derajat Otonomi Fiskal Daerah tahun t

PAD<sub>t</sub> = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD<sub>t</sub> = Total Penerimaan Daerah tahun t

TP<sub>t</sub> = Transfer Pemerintah tahun t

Dengan menggunakan rumus di atas apabila persentase yang didapatkan mendekati angka 100% merupakan indikasi bahwa suatu daerah akan semakin mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, tingkat ketergantungan di daerah terhadap pusat semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, apabila persentase yang didapatkan ternyata semakin kecil mengindikasikan bahwa suatu daerah belum mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat semakin tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi DOFD dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis dengan model (Depdagri, RI, 1991)

$$a. PPAD = \frac{\sum PAD}{\sum TPD} \times 100\%$$

$$b. PBHP = \frac{\sum BHP}{\sum TPD} \times 100\%$$

$$c. \text{ PSB} = \frac{\sum \text{SB}}{\sum \text{TPD}} \times 100\%$$

PPAD adalah Peranan Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

PBHP adalah Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

BHP adalah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

PSB adalah Peranan Sumbangan dan Bantuan

SB adalah Sumbangan dan Bantuan

TPD adalah Total Penerimaan Daerah

Jika dari perhitungan di atas diketahui bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan dari pemerintah pusat hasilnya kecil, maka tingkat ketergantungan pemerintah kota terhadap pemerintah pusat semakin rendah.

3. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin daerah digunakan rumus (Tumilar, 1997:38)

$$\text{IKRD}_t = \frac{\text{TPAD}_t}{\text{TPRD}_t} \times 100\%$$

$\text{IKRD}_t$  = Indeks Kemampuan Rutin Daerah tahun t

$\text{TPAD}_t$  = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

$\text{TPRD}_t$  = Total Pengeluaran Rutin Daerah tahun t

Untuk tolok ukur kemampuan rutin daerah adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah memiliki kriteria kemampuan rutin daerah yang dikategorikan sebagai berikut (Tumilar, 1997:38)

**Tabel III.1**  
**Kategori Kemampuan Rutin Daerah**

Kisaran	Kemampuan Rutin Daerah
00,00%-20,00%	Sangat Kurang
20,10%-40,00%	Kurang
40,10%-60,00%	Cukup
60,10%-80,00%	Baik
80,10%-100,00%	Sangat Baik Sekali

*Sumber : Tumilar, 1997 : 38*

Dengan menggunakan rumus di atas apabila semakin tinggi persentase Indeks Kemampuan Rutin Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan Kota Yogyakarta dalam membiayai kebutuhan rutinnya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah.

#### 4. Menentukan Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Untuk melihat kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan menganalisis secara deskriptif aspek-aspek keuangan dengan menggunakan tolok ukur derajat otonomi fiskal daerah, kemampuan rutin daerah dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahun 2001 pada saat otonomi daerah diberlakukan. Menurut Depdagri (1991), derajat otonomi fiskal daerah dapat diukur dari dua hal, yaitu : rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah yang mencerminkan kemampuan

Pendapatan Asli Daerah membiayai pengeluaran dan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap sumbangan dan bantuan yang mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kategori derajat otonomi fiskal daerah adalah :

**Tabel III.2**  
**Kategori Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kisaran</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
00,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup
40,10% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat baik

*Sumber : Hendrik, 2000 : 35*

Selama tahun anggaran 1997/1998-1999/2000 dan tahun 2001-2003 terjadi perubahan periode tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2000. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta realisasinya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dimulai pada tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 atau selama sembilan bulan. Sedangkan tiga bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Maret 2000 dimasukkan ke dalam tahun anggaran 1999/2000.



Tahun 2001 dan seterusnya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755. Pada tahun tersebut juga dibangun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di bekas hutan Bering. Daerah itu berada di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, di mana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu.

Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk tanggal 7 Juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan. Kota Yogyakarta lahir pada saat perjuangan nasional ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat pertama yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Beliau bertanggungjawab langsung atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia. Tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan

amanat yang kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun Pakualaman, telah mempunyai satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Dewan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman. Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom karena kekuasaan otonomi yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 tahun 1947 pasal 1 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah di Kabupaten Bantul sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

## **B. Kondisi Geografis**

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" - 110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26" - 07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 – 2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa.

Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Secara garis besar Kota Yogyakarta adalah dataran rendah yang dilintasi oleh 3 sungai, yaitu :

Sebelah timur : Sungai Gajahwong

Sebelah tengah : Sungai Code

Sebelah barat : Sungai Winongo

Jarak dari Kota Yogyakarta ke beberapa tempat penting lainnya, seperti :

Candi Borobudur : 40 Km

Candi Prambanan : 15 Km

Kaliurang : 27 Km

Makam Imogiri : 18 Km

Gua Selarong : 9 Km

Pantai Samas : 25 Km

Parangtritis : 27 Km

Pantai Baron : 61 Km

Kraton Solo : 68 Km

Tawangmangu : 110 Km

Jatijajar : 150 Km

Baturaden : 200 Km

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

### **C. Iklim**

Secara umum, curah hujan tertinggi tahun 2003 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 244 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus (0 mm). Rata-rata hari hujan perbulan adalah 6 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 85 persen dan terendah pada bulan September sebesar 72 persen. Tekanan udara rata-rata 1.011,4 mb dan suhu udara rata-rata 26,3°C.

### **D. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 1999-2004 terdiri dari 40 orang anggota berasal dari 6 fraksi.

### E. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW, dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 km<sup>2</sup>.

Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.099.263 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 22.287 hektar.

**Tabel IV.1**  
**Jarak antara Balaikota Yogyakarta**  
**dengan Kantor Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jarak (Km)</b>
1. Manrijeron	5,5
2. Kraton	4,0
3. Mergangsan	2,0
4. Umbulharjo	1,0
5. Kotagede	1,0
6. Gondokusuman	3,0
7. Danurejan	1,0
8. Pakualaman	1,5
9. Gondomanan	3,0
10. Ngampilan	5,0
11. Wirobrajan	5,0
12. Gedongtengen	5,0
13. Jetis	4,0
14. Tegalrejo	6,0

*Sumber : Monografi Kecamatan se-Kota Yogyakarta dalam BPS Kota Yogyakarta*

### F. Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, penduduk Yogyakarta berjumlah 397.398 orang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus

Penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990 – 2000 sebesar -0.37 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2003 tercatat 392.239 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,93 persen laki-laki dan 51,07 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.069 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel IV.2**  
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta**  
**Hasil Sensus Penduduk**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
1971	169.491	171.417	99,88
1980	199.755	198.437	100,66
1990	202.002	210.057	96,17
1995	211.968	206.976	102,41
2000	194.530	202.868	95,89

*Sumber : BPS Kota Yogyakarta*

**Tabel IV.3**  
**Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Di Kota Yogyakarta**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	12.933	12.180	25.113
5-9	12.538	11.959	24.497
10-14	12.658	12.420	25.078
15-19	22.537	25.755	48.292
20-24	32.007	31.814	63.821
25-29	20.234	18.617	38.851
30-34	15.839	16.384	32.223
35-39	13.813	14.587	28.400
40-44	12.372	12.723	25.095
45-49	9.742	9.996	19.738
50-54	6.271	6.990	13.261
55-59	5.633	6.557	12.190
60-64	5.074	6.394	11.468
65-69	3.976	5.453	9.429
70-74	3.305	4.141	7.446
75 +	2.986	4.351	7.337
<b>Jumlah</b>	<b>191.918</b>	<b>200.321</b>	<b>392.239</b>

*Sumber : BPS Kota Yogyakarta*

### **G. Tenaga Kerja**

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat 9.984 orang, yang terdiri dari 87,40 persen pegawai pemerintah daerah dan 12,60 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,38 persen, golongan II 25,09 persen, golongan III 52,23 persen dan sisanya golongan IV 20,29 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2003 sebanyak 4.733 orang yang terdiri dari 2.476 laki-laki dan 2.257 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan



sarjana yaitu 47,28 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (39,72 persen), Diploma (10,71 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP, dan SD.

#### **H. Transmigrasi**

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat 50 kepala keluarga yang terdiri dari 171 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut berasal dari Kecamatan Kotagede dan Jetis, dan daerah penempatan terbanyak adalah Kalimantan Timur.

#### **I. Transportasi**

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2003 mencapai 479.162 km dengan rincian : 324.320 km jalan yang sudah diaspal, 8.202 km jalan tanah, dan 146.620 km jalan diperkeras. Panjang jalan yang berada di bawah kewenangan negara 18.132 km, sedangkan 3.733 km berada dibawah kewenangan Propinsi D.I. Yogyakarta dan 457.297 km berada di bawah kewenangan Kota Yogyakarta. Kondisi jalan secara umum dapat dikatakan layak untuk dilalui, 24,17 persen kondisi jalan baik, 70,37 persen kondisi jalan sedang, dan 5,46 persen kondisi jalan rusak.

Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2003, jumlah kendaraan umum bermotor roda empat atau lebih tercatat sebanyak 8.323 unit. Komposisinya pada tahun 2003 terdiri atas : 8,70 persen mobil penumpang umum, 58,37 persen pick up, 19,40 persen truk, 11,52 persen kendaraan bis.

Perhubungan darat kendaraan bus dilayani di Terminal Giwangan. Sedangkan perhubungan udara dilayani oleh Bandara Adi Sucipto.

Angkutan kereta api yang ada di Kota Yogyakarta meliputi angkutan untuk penumpang dan barang, yang terdiri dari dua stasiun yaitu stasiun Tugu yang khusus diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis dan eksekutif dan stasiun Lempuyangan yang diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta ekonomi serta barang.

#### **J. Pos dan Komunikasi**

Jumlah warung telekomunikasi (wartel) di wilayah Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2002 ada sebanyak 3.604 wartel, yang terbagi ke dalam tiga wilayah stasiun telepon otomatis. Di wilayah stasiun otomatis Kotabaru terdapat 2.262 wartel, Pugeran 1.016 wartel, dan Kentungan 326 wartel. Sedangkan jumlah telepon umum yang ada di tiga wilayah stasiun otomatis tersebut mencapai 1.474 sambungan telepon umum kartu dan 376 sambungan telepon umum koin.

Lalu lintas surat pos dan giro selama kurun waktu 2003 mencapai 17.998 ribu surat yang dikirim melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim naik 16,90 persen.

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik massal yang sampai saat ini masih banyak digemari. Terdapat 11 stasiun radio swasta di Kota Yogyakarta pada tahun 2003.

## **K. Kekayaan Alam**

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kota Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air, maupun kandungan mineral yang tersimpan dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas, kota Yogyakarta mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut adalah :

### **1. Tanah**

Jenis tanah yang terdapat di wilayah kota Yogyakarta adalah tanah alluvial, litosal, regosol, rensina, glomosal, meditrans, dan latosol. Penguasaan tanah di kota Yogyakarta dikategorikan menjadi 2, yaitu : tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang diwarisi secara turun-temurun yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah untuk kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan, dan lain-lain.

### **2. Air**

Kondisi sumber daya air di kota Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan untuk kepentingan lainnya. Air tanah dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga,

perkantoran, perhotelan, dan industri lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

### 3. Flora dan fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang dimiliki kota Yogyakarta adalah padi, ubi kayu, kacang kedelai, kelapa, kapuk, dan sebagainya. Jenis binatang meliputi : jenis hewan yang ditanakkan seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas, dan binatang satwa lainnya.

### 4. Bahan tambang

Bahan tambang yang terdapat di kota Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C, yaitu seperti : kerikil, pasir, dan sebagainya.

## **L. Nilai-nilai Budaya**

Yogyakarta terkenal akan masakan khasnya, yakni : gudeg. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota revolusi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekelilingnya. Kebudayaan tersebut adalah :

### 1. Kesenian

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri khasnya, terutama tercermin pada bidang seni tari, karawitan klasik, wayang dan ketoprak. Bentuk seni tari di antaranya yaitu tari bedoyo, tari golek, tari serimpi, dan sebagainya.

## 2. Pakaian Adat

Pakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara lain untuk kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri atas tutup kepala, baju jas dengan leher tertutup, dan keris yang diselipkan di pinggang. Ia juga mengenakan pakaian batik yang mempunyai motif yang sama dengan dipakai pasangannya. Pakaian wanita terdiri atas kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan diberi hiasan konde.

## 3. Senjata

Senjata tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk keris dan tombak. Selain itu juga dikenal dengan adanya tosan aji yang mana tosan berarti besi dan aji berarti dihormati karena berpetuah, sehingga tosan aji berarti senjata yang dihormati karena berpetuah.

## 4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan empat macam bentuk yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, yaitu :

- a. Panggape, mempunyai atap satu sisi
- b. Kampung, mempunyai atap dua sisi
- c. Limasan, mempunyai atap tiga sisi
- d. Joglo, mempunyai atap empat sisi seperti limasan hanya bubungannya lebih tinggi.

## **M. Ekonomi**

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di kota Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju keseimbangan antara industri pertanian yang mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi.

Sektor ekonomi itu adalah :

### **1. Pertanian**

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama bagi sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di kota Yogyakarta. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan pertanian semakin lama semakin sempit karena dipergunakan untuk pemukiman penduduk.

### **2. Industri**

Industri di kota Yogyakarta tidak banyak, karena Yogyakarta bukan kota industri. Kota Yogyakarta memiliki beberapa perusahaan kecil, seperti : kerajinan di Kota Gede, BUMD, perusahaan susu SGM, dan industri kecil lainnya.

### 3. Pariwisata

Kota Yogyakarta juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di kota Yogyakarta meliputi : Kraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, kebun binatang Gembira Loka, dan tujuan wisata lainnya.

### 4. Perdagangan

Pusat perdagangan di Kota Yogyakarta berpusat di pasar Beringharjo di mana pasar ini merupakan pasar terbesar di kota Yogyakarta, di samping pasar Beringharjo termasuk dalam kawasan Malioboro.

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Diskripsi Data

**Tabel V.1**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>
1997/1998	19.154.650.370,17
1998/1999	19.972.895.793,60
1999/2000	24.790.128.183,92
2000	29.937.269.668,00
2001	40.352.592.890,43
2002	56.377.459.398,89
2003	68.621.564.311,07

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*

**Tabel V.2**  
**Realisasi Transfer Pemerintah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Transfer Pemerintah</b>
1997/1998	24.284.198.476,22
1998/1999	39.719.361.869,00
1999/2000	55.097.232.636,00
2000	64.344.011.749,00
2001	113.437.221.225,00
2002	162.874.512.500,00
2003	196.100.000.000,00

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*



**Tabel V.3**  
**Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Laba BUMD</b>	<b>Penerimaan Dinas</b>	<b>Penerimaan Lain-lain</b>	<b>Total PAD</b>
1997/1998	10.335.741	7.226.736	612.327	475.319	504.525	19.154.650
1998/1999	10.266.547	7.157.371	879.374	467.991	1.201.610	19.972.895
1999/2000	13.688.831	7.978.502	1.116.628	-	2.006.166	24.790.128
2000	12.025.309	7.126.576	1.926.370	-	1.374.695	22.452.952
2001	22.886.374	11.773.895	2.249.570	-	3.442.752	40.352.592
2002	30.517.591	14.193.457	2.509.234	-	9.157.175	56.377.459
2003	33.526.514	16.093.220	4.081.649	-	14.920.180	68.621.564

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*

**Tabel V.4**  
**Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Sisa Lebih Tahun Lalu</b>	<b>PAD</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>Pinjaman Daerah</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sah</b>	<b>Total Penerimaan Daerah</b>
1997/1998	2.462.916.334	19.154.650.370	32.365.636.875	739.185.630	-	54.722.389.209
1998/1999	2.998.386.337	19.972.895.793	48.399.507.567	-	-	71.370.789.698
1999/2000	7.043.393.541	24.790.128.183	65.671.731.183	-	-	97.505.252.908
2000	21.474.332.743	22.452.952.250	60.548.896.821	-	-	104.476.181.815
2001	19.183.584.331	40.352.592.890	167.269.506.353	-	203.486.495	227.009.170.069
2002	35.596.366.520	56.377.459.398	187.968.763.862	-	23.077.480.755	303.020.070.537
2003	-	68.621.564.311	253.512.731.343	-	16.496.466.000	338.630.761.654

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*

**Tabel V.5**  
**Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>
1997/1998	8.081.438.399,00
1998/1999	8.680.145.698,85
1999/2000	10.574.498.547,01
2000	16.387.917.346,00
2001	33.118.034.019,29
2002	25.094.251.362,24
2003	32.300.731.328,00

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*

**Tabel V.6**  
**Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Sumbangan dan Bantuan</b>
1997/1998	24.284.198.476,22
1998/1999	39.719.361.869,00
1999/2000	55.097.232.636,00
2000	64.344.011.749,00
2001	113.437.221.225,00
2002	162.874.512.500,00
2003	196.100.000.000,00

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*

**Tabel V.7**  
**Total Pengeluaran Rutin Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Pengeluaran</b>	<b>1997/1998</b>	<b>1998/1999</b>	<b>1999/2000</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	15.038.689.562	28.920.206.862	38.328.851.589	35.546.327.280	142.335.453.916	135.393.683.816	172.678.791.548
<b>Belanja Barang</b>	6.517.178.984	7.491.128.097	10.976.764.521	9.512.780.344	21.595.467.694	27.899.625.010	40.064.303.807
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	2.970.348.936	2.784.390.359	3.532.998.612	3.334.608.585	5.641.966.729	8.147.911.969	13.028.100.205
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	235.568.100	78.202.000	191.731.900	176.157.600	2.672.404.600	2.110.625.725	3.911.729.577
<b>Belanja Lain-lain</b>	4.588.571.760	4.484.803.818	4.916.529.664	4.718.834.954	-	12.977.997.388	58.140.566.665
<b>Angsuran Pinjaman</b>	2.183.289.776	2.438.179.530	2.361.657.700	1.297.638.616	2.312.394.074	2.223.800.069	-
<b>Subsidi/Sumbangan</b>	655.014.420	611.233.339	659.162.954	519.846.225	662.900.510	-	-
<b>Pengel. Bukan Bagian Lain</b>	884.570.344	914.818.632	1.181.200.900	570.793.730	632.461.153	1.577.798.332	17.172.995.474
<b>Pengel. Tidak Tersangka</b>	17.435.375	125.336.500	215.205.787	23.171.500	107.661.000	495.782.450	354.545.150
<b>Total PRD</b>	<b>33.090.667.258</b>	<b>47.848.299.140</b>	<b>62.364.103.628</b>	<b>55.700.578.835</b>	<b>175.960.709.677</b>	<b>190.827.224.760</b>	<b>305.351.032.427</b>

*Sumber : BPKD Kota Yogyakarta*

## **B. Analisis Data**

### **1. Pertumbuhan dan Perkembangan**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah, kita harus melihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan dapat kita hitung dengan mengurangkan realisasi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasilnya kemudian dikalikan dengan 100 %.

Data tahun 2000 hanya terhitung sembilan bulan akibat terjadinya perubahan periode tahun anggaran. Karena itu, data tahun tersebut disetahunkan dengan cara membagi sembilan realisasi data kemudian hasil yang diperoleh dikalikan dua belas.

Berikut ini ditampilkan tabel perkembangan dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta :

**Tabel V.8**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1997/1998	19.154.650.370,17	-	-
1998/1999	19.972.895.793,60	818.245.423,43	4,27
1999/2000	24.790.128.183,92	4.817.232.390,32	24,12
2000	29.937.269.668,00	5.147.141.484,08	20,76
2001	40.352.592.890,43	10.415.323.222,43	34,79
2002	56.377.459.398,89	16.024.866.508,46	39,71
2003	68.621.564.311,07	12.244.104.912,18	21,72
<b>Rata-rata</b>			24,23

*Sumber : Data diolah (2005)*

Berdasarkan data di atas, besarnya laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 24,23% per tahun.

- i. Pada tahun 1998/1999, perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 4,27 %. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan lain-lain mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1997/1998.
- ii. Pada tahun 1999/2000, perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 24,12 %. Pada

tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1998/1999.

- iii. Pada tahun 2000, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 20,76 %. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1999/2000.
- iv. Pada tahun 2001, perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 34,79 %. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2000.
- v. Pada tahun 2002, perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 39,71 %. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah mengalami

peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2001.

- vi. Pada tahun 2003, perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 21,72 %. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2002.

#### **b. Transfer Pemerintah**

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari Transfer Pemerintah, kita harus melihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan Transfer Pemerintah dengan nama lain Sumbangan dan Bantuan atau Dana Alokasi Umum. Pertumbuhan dapat kita hitung dengan mengurangkan realisasi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasilnya kemudian dikalikan dengan 100 %.



**Tabel V.9**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan TP Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>TP (Rp)</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1997/1998	24.284.198.476,22	-	-
1998/1999	39.719.361.869,00	15.435.163.392,78	63,56
1999/2000	55.097.232.636,00	15.377.870.767,00	38,72
2000	64.344.011.749,00	9.246.779.110,00	16,78
2001	113.437.221.225,00	49.093.209.476,00	76,29
2002	162.874.512.500,00	49.437.291.275,00	43,58
2003	196.100.000.000,00	33.225.487.500,00	16,94
<b>Rata-rata</b>			<b>42,65</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Berdasarkan data di atas, besarnya laju pertumbuhan Transfer Pemerintah di Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan Transfer Pemerintah adalah sebesar 42,65 % per tahun yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

## **2. Derajat Otonomi Fiskal Daerah**

Alat analisis yang digunakan untuk menentukan hubungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal yang kuat antara daerah dengan pemerintah pusat adalah dengan rumus sebagai berikut :



$$a. \text{DOFD}_t = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal Daerah yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah :

**Tabel V.10**  
**Rasio PAD terhadap TPD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>TPD (Rp)</b>	<b>DOFD (%)</b>
1997/1998	19.154.650.370,17	54.722.389.209,76	35,00
1998/1999	19.972.895.793,60	71.370.789.698,85	27,98
1999/2000	24.790.128.183,92	97.505.252.908,02	25,42
2000	29.937.269.668,00	104.476.181.815,83	28,65
2001	40.352.592.890,43	227.009.170.069,98	17,78
2002	56.377.459.398,89	303.020.070.537,68	18,61
2003	68.621.564.311,07	338.630.761.654,14	20,26
<b>Rata-rata</b>			<b>24,81</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Hasil analisis menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 cenderung menurun yang berarti kemampuan Kota Yogyakarta dalam membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah belum begitu baik. Tetapi saat otonomi daerah dilaksanakan mulai tahun 2001, Derajat Otonomi Fiskal Daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mulai meningkat yang mengindikasikan bahwa Kota

Yogyakarta mulai mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus lain sebagai berikut :

$$b. \text{DOFD}_t = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TP}_t} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal Daerah yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Transfer Pemerintah :

**Tabel V.11**  
**Rasio PAD terhadap TP Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>TP (Rp)</b>	<b>DOFD (%)</b>
1997/1998	19.154.650.370,17	24.284.198.476,22	78,88
1998/1999	19.972.895.793,60	39.719.361.869,00	50,29
1999/2000	24.790.128.183,92	55.097.232.636,00	44,99
2000	29.937.269.668,00	64.344.011.749,00	46,53
2001	40.352.592.890,43	113.437.221.225,00	35,57
2002	56.377.459.398,89	162.874.512.500,00	34,61
2003	68.621.564.311,07	196.100.000.000,00	34,99
<b>Rata-rata</b>			<b>46,55</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Hasil analisis menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 rata-rata sebesar 46,55 % per tahun yang berarti tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta belum mampu mencukupi kebutuhan otonomi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis :

#### a. Peranan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui Peranan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$PPAD = \frac{\sum PAD}{\sum TPD} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel hasil perhitungan Peranan Pendapatan Asli Daerah yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah :

**Tabel V.12**  
**Peranan PAD terhadap TPD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>TPD (Rp)</b>	<b>PPAD (%)</b>
1997/1998	19.154.650.370,17	54.722.389.209,76	35,00
1998/1999	19.972.895.793,60	71.370.789.698,85	27,98
1999/2000	24.790.128.183,92	97.505.252.908,02	25,42
2000	29.937.269.668,00	104.476.181.815,83	28,65
2001	40.352.592.890,43	227.009.170.069,98	17,78
2002	56.377.459.398,89	303.020.070.537,68	18,61
2003	68.621.564.311,07	338.630.761.654,14	20,26
<b>Rata-rata</b>			<b>24,81</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peranan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998

sampai dengan tahun 2001 cenderung menurun yang berarti kemampuan Kota Yogyakarta dalam membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah belum begitu baik. Tetapi Peranan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mulai meningkat yang berarti Kota Yogyakarta sudah mulai mampu untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah.

#### **b. Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak**

Untuk mengetahui Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak digunakan rumus sebagai berikut :

$$PBHP = \frac{\sum BHP}{\sum TPD} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel perkembangan dan pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Yogyakarta :

**Tabel V.13**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan BHP Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>BHP (Rp)</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
1997/1998	8.081.438.399,00	-	-
1998/1999	8.680.145.698,85	598.707.299,85	7,41
1999/2000	10.574.498.547,01	1.894.352.848,16	21,82
2000	16.387.917.346,00	5.813.418.798,99	54,98
2001	33.118.034.019,29	16.730.116.673,29	102,08
2002	25.094.251.362,24	(8.023.782.650,05)	(24,23)
2003	32.300.731.328,00	7.206.479.965,76	28,72
<b>Rata-rata</b>			<b>31,80</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah yang akan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel V.14**  
**Peranan BHP terhadap TPD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>BHP (Rp)</b>	<b>TPD (Rp)</b>	<b>PBHP (%)</b>
1997/1998	8.081.438.399,00	54.722.389.209,76	14,77
1998/1999	8.680.145.698,85	71.370.789.698,85	12,16
1999/2000	10.574.498.547,01	97.505.252.908,02	10,85
2000	16.387.917.346,00	104.476.181.815,83	15,68
2001	24.838.525.514,00	227.009.170.069,98	10,94
2002	25.094.251.362,24	303.020.070.537,68	8,28
2003	32.300.731.328,00	338.630.761.654,14	9,54
<b>Rata-rata</b>			<b>11,71</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 cenderung berfluktuasi rata-rata sebesar 11,71 % per tahun menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta cukup rendah.

### c. Peranan Sumbangan dan Bantuan

Untuk mengetahui Peranan Sumbangan dan Bantuan digunakan rumus sebagai berikut :

$$PSB = \frac{\sum SB}{\sum TPD} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel Peranan Sumbangan dan Bantuan Kota Yogyakarta :

**Tabel V.15**  
**Peranan SB terhadap TPD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	SB (Rp)	TPD (Rp)	PSB (%)
1997/1998	24.284.198.476,22	54.722.389.209,76	44,38
1998/1999	39.719.361.869,00	71.370.789.698,85	55,65
1999/2000	55.097.232.636,00	97.505.252.908,02	56,51
2000	64.344.011.749,00	104.476.181.815,83	61,58
2001	113.437.221.225,00	227.009.170.069,98	49,97
2002	162.874.512.500,00	303.020.070.537,68	53,75
2003	196.100.000.000,00	338.630.761.654,14	57,91
<b>Rata-rata</b>			54,25

Sumber : Data diolah (2005)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 cenderung meningkat rata-rata sebesar 54,25 % per tahun menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta cukup tinggi atau dengan kata lain tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

### **3. Indeks Kemampuan Rutin Daerah**

Untuk mengetahui Indeks Kemampuan Rutin Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKRD_t = \frac{TPAD_t}{TPRD_t} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin Daerah Kota Yogyakarta :



**Tabel V.16**  
**Peranan PAD terhadap PRD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – Tahun 2003**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>PRD (Rp)</b>	<b>IKRD (%)</b>
1997/1998	19.154.650.370,17	33.090.667.258,55	57,89
1998/1999	19.972.895.793,60	47.848.299.140,12	41,74
1999/2000	24.790.128.183,92	62.364.103.628,35	39,75
2000	29.937.269.668,00	55.700.578.835,44	53,75
2001	40.352.592.890,43	175.960.709.677,39	22,93
2002	56.377.459.398,89	190.827.224.760,01	29,54
2003	68.621.564.311,07	305.351.032.427,44	22,47
<b>Rata-rata</b>			<b>38,30</b>

*Sumber : Data diolah (2005)*

Indeks Kemampuan Rutin Daerah menunjukkan hasil pengukuran sampai seberapa besar Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai kebutuhan pengeluaran rutin. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin Daerah cenderung masih rendah yaitu rata-rata sebesar 38,30 % per tahun. Menurut kategori kemampuan rutin daerah berada dalam kisaran 20,10% - 40,00% dengan kata lain masih kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran rutin daerah tersebut.

### **C. Pembahasan**

Besarnya laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 rata-rata meningkat sebesar 24,23 % per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan Transfer Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 rata-rata meningkat sebesar 42,65 % per tahun.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah dari tahun 1997/1998 – 2003 menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta termasuk kriteria sedang, sesuai dengan tolok ukur yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada dan Depdagri. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa Kota Yogyakarta mulai mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Transfer Pemerintah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 rata-rata sebesar 46,55 % per tahun yang berarti tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta belum mampu mencukupi kebutuhan otonomi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah antara lain : Peranan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 cenderung menurun tetapi Peranan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mulai meningkat yang berarti Kota Yogyakarta sudah mulai mampu untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah.

Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 cenderung berfluktuasi rata-rata sebesar 11,71 % per tahun menunjukkan

bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta cukup rendah.

Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 cenderung meningkat rata-rata sebesar 54,25 % per tahun menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta cukup tinggi.

Indeks Kemampuan Rutin Daerah dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran rutin daerah dari tahun 1997/1998 – 2003 rata-rata sebesar 38,30 % per tahun, terletak antara 20,10 % – 40,00 % menurut kategori kemampuan keuangan rutin daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin masih kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran rutin daerah tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 24,23% per tahun.
2. Besarnya laju pertumbuhan Transfer Pemerintah di Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan Transfer Pemerintah meningkat sebesar 42,65 % per tahun.
3. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah dari tahun 1997/1998 – 2003 rata-rata sebesar 24,81 % menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta termasuk kriteria sedang.
4. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Yogyakarta dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Transfer Pemerintah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 rata-rata sebesar 46,55 % per tahun menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi

5. Peranan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2000 cenderung menurun tetapi kemudian dari tahun 2001-2003 mengalami peningkatan yang berarti Kota Yogyakarta sudah mulai mampu untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah.
6. Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 cenderung berfluktuasi rata-rata sebesar 11,71 % per tahun menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta cukup rendah.
7. Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 cenderung meningkat rata-rata sebesar 54,25 % per tahun menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta cukup tinggi.
8. Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2003 rata-rata sebesar 38,30 % per tahun menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin masih kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran rutin daerah tersebut.

## **B. Saran**

1. Menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi memberi tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Dilihat dari Tabel V.3, pos terkecil dari sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta berasal dari penerimaan laba Badan Umum Milik Daerah. Pemerintah Kota diharapkan dapat meningkatkan pos penerimaan laba Badan Umum Milik Daerah untuk dapat memberi tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagian besar lahan di Kota Yogyakarta dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman sehingga pemerintah dapat meningkatkan penerimaan daerah dari bagian daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) dengan cara mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI dan Fisipol UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Dati II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: UI Press.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hendrik, M.Y. (2000). "Kesiapan Mimika Menjadi Daerah Otonom". *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.
- Ismanthono, Henricus W. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Edisi Pertama. Jakarta: Kompas.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat*. Edisi Pertama. Jakarta: Cides.
- Kuncoro, M. (1995). "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan". *Prisma*. No. 4, 3-17.
- Radianto, Elia. (1997). "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu Studi di Maluku". *Prisma*. No.3, 39-50.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Tumilar, Richard L.H. (1997). "Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulut". *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 1544

Membaca Surat : **Ka. Prodi-Akt-UNSADHAR-Yogyakarta** No : Kaprodi Akt./157/II/2005  
Tanggal : 07 Februari 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

N a m a : **Ch. ERLITA RETNOWATI** No. MHSW : 012114109  
Alamat Instansi : **Mrican-Yogyakarta**  
Judul : **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA**

Lokasi : **Kota Yogyakarta**

Waktunya : Mulai tanggal **24 Maret 2005** s/d **24 Juni 2005**

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

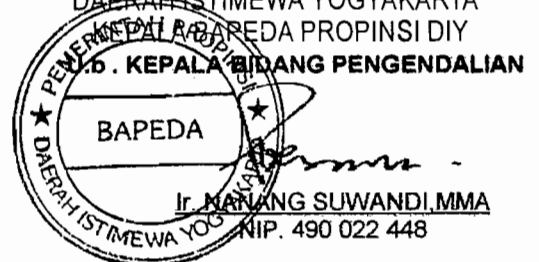
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta, cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. BPS Prop. DIY;
4. Ka. BPKD Prop. DIY;
5. Dekan, FE-UNSADHAR-Yogyakarta;
6. ~~Pertinggal.~~

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : **24 Maret 2005**

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH PROPINSI DIY  
**D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN**





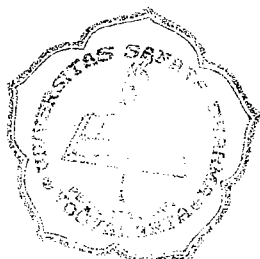
## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **KETERANGAN PRIBADI**

Nama Lengkap : Christina Erlita Retnowati  
Nama Panggilan : Retno/ Eno  
Tempat, tanggal lahir : Cilegon, 27 Maret 1983  
Alamat Rumah : Pondok Cilegon Indah Blok D89 No. 22 Cilegon – Banten  
No. Handphone : 0817-079-7893  
Alamat e-mail : [horeduatujuh@yahoo.com](mailto:horeduatujuh@yahoo.com)

### **KETERANGAN PENDIDIKAN**

Tahun 1989-1995 : SD Mardi Yuana Cilegon - Banten  
Tahun 1995-1998 : SMP Pangudi Luhur Jakarta Selatan  
Tahun 1998-2001 : SMU Tarakanita I Jakarta Selatan  
Tahun 2001-2005 : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta



Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erlita", written over a horizontal line.

Ch. Erlita Retnowati